



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUHARTONO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 755010

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 752.400.000

1. Tanah Seluas 732 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI
Rp. 292.800.000
2. Tanah Seluas 154 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, WARISAN Rp.
61.600.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 490 m2/126 m2 di KAB / KOTA
WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 398.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 176.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU TARUNA Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp.
63.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU SIGRA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
85.000.000
3. MOTOR, SUZUKI TITAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
7.500.000
5. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 44.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	419.050.248
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.392.550.248
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.392.550.248

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : INDAH KUSWATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 716953

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.025.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 365 m2/96 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI	Rp.	1.025.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	80.000.000
1. MOBIL, WULING CONFERO Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	80.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	5.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.900.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.117.650.000
III. HUTANG	Rp.	6.604.495
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.111.045.505

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI ARIYANTI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 746875

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	150.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	194.500.000
1. MOTOR, HONDA D1A02N18MI A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
2. MOTOR, HONDA NF 100 L Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 G AT (F653R) Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
4. MOTOR, HONDA L1F02N37L1 A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	19.656.763
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	364.156.763
III. HUTANG	Rp.	256.124.600
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	108.032.163

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BINA YULIATAMA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 715962

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 476.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m2/143 m2 di KAB / KOTA
WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 326.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/300 m2 di KAB / KOTA
WONOGIRI, WARISAN Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 142.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
124.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 75.200.500

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 693.200.500

III. HUTANG Rp. 195.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 498.200.500

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RETNO ARI ERLINA
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 714521

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	315.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 304 m2/304 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, WARISAN	Rp. 315.000.000	
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	158.430.000
1. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI	Rp. 22.000.000	
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G Tahun 2007, HASIL SENDIRI	Rp. 110.000.000	
3. MOTOR, HONDA L1FO2N37L1 A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI	Rp. 26.430.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	53.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	69.900.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	596.330.000
III. HUTANG	Rp.	103.412.284
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	492.917.716

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.